

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Lampung dengan menggunakan data sekunder yang ditunjang dengan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Anggaran (Silpa), Dana Perimbangan dan Belanja Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2001 – 2012.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan data yang bersumber dari publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta dengan mengumpulkan informasi dan studi pustaka dari buku-buku, literatur dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **C. Definisi Variabel**

Pengertian dan batas variabel yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Badan Pusat Statistik, PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang di berikan PAD terhadap APBD.

## 2. Sisa Lebih Anggaran (Silpa)

Merupakan selisih lebih antara penerimaan daerah atas belanja yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran ditambah selisih lebih transaksi pembiayaan penerimaan dan pengeluaran.

## 3. Dana Perimbangan

Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada daerah dengan presentase tertentu yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001.

#### 4. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Alat Analisis**

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, dimana untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Lampung, yang dilakukan dengan menggunakan indikator penilaian Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Tingkat Desentralisasi Fiskal, dan Tingkat Efisiensi.

#### **E. Metode Perhitungan**

##### 1) Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan daerah diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam

mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/provinsi menurut Halim(2001:127) adalah sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian Keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = (\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} / (\text{Dana Perimbangan}))$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

**Tabel 4. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah**

| <b>Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan</b> | <b>Kemandirian Keuangan Daerah</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 0,00% - 10,00%                                  | Sangat Kurang                      |
| 10,01% - 20,00%                                 | Kurang                             |
| 20,01% - 30,00%                                 | Sedang                             |
| 30,01% - 40,00%                                 | Cukup                              |
| 40,01% - 50,00%                                 | Baik                               |
| >50,00%                                         | Sangat Baik                        |

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

## 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = (\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} / \text{Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi})$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

| <b>Prosentase PAD Terhadap Total Penerimaan Non Subsidi</b> | <b>Ketergantungan Keuangan Daerah</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0,00% - 10,00%                                              | Sangat Rendah                         |
| 10,01% - 20,00%                                             | Rendah                                |
| 20,01% - 30,00%                                             | Sedang                                |
| 30,01% - 40,00%                                             | Cukup                                 |
| 40,01% - 50,00%                                             | Tinggi                                |
| >50,00%                                                     | Sangat Tinggi                         |

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

### 3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Berikut formula untuk mengukur Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 6 berikut :

**Tabel 6. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal**

| Persentase Total Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah | Tingkat Desentralisasi Fiskal |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 0,00-10,00                                                               | Sangat Kurang                 |
| 10,01-20,00                                                              | Kurang                        |
| 20,01-30,00                                                              | Sedang                        |
| 30,01-40,00                                                              | Cukup                         |
| 40,01-50,00                                                              | Baik                          |
| > 50,00                                                                  | Sangat Baik                   |

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

#### 4. Rasio Efisiensi

Pengukuran Tingkat Efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = ((\text{Pengeluaran Belanja} / (\text{Pendapatan}) \times (100\%))$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

**Tabel 7. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah**

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria       |
|-----------------------------|----------------|
| 100% ke atas                | Tidak Efisien  |
| 90% - 100%                  | Kurang Efisien |
| 80% - 90%                   | Cukup Efisien  |
| 60% - 80%                   | Efisien        |
| Di bawah 60%                | Sangat Efisien |

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

#### 2) Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran

Untuk menggambarkan Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Lampung di gunakan parameter perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran pertumbuhan (*growth*) dari masing-masing PAD dan melalui analisis peranan

PAD (*share*) terhadap APBD.

- a) Analisis pertumbuhan (*growth*) PAD merupakan angka pertumbuhan PAD setiap tahunnya menggunakan rumus yang ada dibawah ini.

$$Growth = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$PAD_i$  = Pendapatan Asli Daerah periode i

$PAD_{i-1}$  = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

- b) Analisis peranan (*share*), yaitu rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah (total belanja) yang berada pada APBD. Dimana rasio ini berguna untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Adapun rumus untuk menghitung *share* adalah :

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

Selanjutnya dengan parameter *share and growth* tersebut dapat digambarkan dalam bentuk suatu peta kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode kuadran.



Tabel 8. Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran

## Rata – rata GROWTH (%)

|                                |                                                  |                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Rata-rata<br/>SHARE (%)</b> | KUADRAN III<br>Share : Tinggi<br>Growth : Rendah | KUADRAN I<br>Share : Tinggi<br>Growth : Tinggi  |
|                                | KUADRAN IV<br>Share : Rendah<br>Growth : Rendah  | KUADRAN II<br>Share : Rendah<br>Growth : Tinggi |

Sumber : Bappenas, 2003

Tabel 9. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan

## Metode Kuadran

| KUADRAN    | KONDISI                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.                                 |
| <b>II</b>  | Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan ( <i>growth</i> ) PAD tinggi. |
| <b>III</b> | Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD nya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun Pertumbuhan PAD rendah.                                           |
| <b>IV</b>  | Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah                                |

Sumber : Bappenas, 2003

## **F. Gambaran Umum Provinsi Lampung**

### **1. Geografi**

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak antara  $6^{\circ}45'$  -  $3^{\circ}45'$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ}40'$  -  $105^{\circ}50'$  Bujur Timur dengan luas wilayah 35.376,84 km<sup>2</sup> dengan ibukota Bandar Lampung, yang dimana merupakan gabungan dari dua kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung. Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, letaknya yang sangat strategis ini menjadi sentral penghubung antara Jawa dan Sumatera, dimana:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia

Provinsi Lampung terdiri atas daerah pesisir, pulau kecil dan laut, luas seluruh daratannya mencapai 3.528.835 ha, sementara garis pantainya sepanjang 1.105 km. Kawasan bagian barat merupakan daerah pegunungan yang menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Tercatat terdapat tiga buah gunung disana dengan tinggi lebih dari 2.000 m dari permukaan laut, yaitu Gunung Pesagi, Gunung Tanggamus dan Gunung Tangkil Tebak. Provinsi ini juga memiliki 70 pulau, dimana terdiri dari 18 pulau berpenghuni dan 52 pulau lainnya tidak bertuan.

## **2. Topografi**

Secara topografis Provinsi Lampung terdiri atas:

1. Daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan  $> 500$  m dpl
2. Daerah berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 8% - 15% dan ketinggian 300 – 500 dpl
3. Daerah dataran alluvial dengan kemiringan 0% - 3% dan ketinggian 25 – 75 m dpl
4. Daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian 0,1 – 1 m dpl
5. Daerah river basin

## **3. Administrasi Pemerintahan**

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah sebuah Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya Kotamadya Tanjungkarang-telukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya BandarLampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983.

**Tabel 10. Luas Ibukota, Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.**

| <b>No</b>                                  | <b>Kabupaten</b>     | <b>Ibukota</b>  | <b>Luas (km<sup>2</sup>)</b> | <b>Kecamatan</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| <b>1</b>                                   | Kab. Lampung Selatan | Kalianda        | 3.319,04                     | 19               |
| <b>2</b>                                   | Kab. Lampung Tengah  | Gunung Sugih    | 3.802,68                     | 28               |
| <b>3</b>                                   | Kab. Lampung Utara   | Kotabumi        | 2.725,83                     | 23               |
| <b>4</b>                                   | Kab. Lampung Barat   | Liwa            | 2.142,78                     | 15               |
| <b>5</b>                                   | Kab. Lampung Timur   | Sukadana        | 5.325,03                     | 24               |
| <b>6</b>                                   | Kab. Tanggamus       | Kota Agung      | 3.020,64                     | 20               |
| <b>7</b>                                   | Kab. Tulang Bawang   | Menggala        | 3.196,32                     | 15               |
| <b>8</b>                                   | Kab. Way Kanan       | Blambangan Umpu | 3.921,63                     | 14               |
| <b>9</b>                                   | Kota BandarLampung   | BandarLampung   | 192,96                       | 13               |
| <b>10</b>                                  | Pesawaran            | Gedung Tataan   | 2.243,51                     | 7                |
| <b>11</b>                                  | Pringsewu            | Pringsewu       | 625                          | 8                |
| <b>12</b>                                  | Mesuji               | Mesuji          | 2.184                        | 7                |
| <b>13</b>                                  | Tulang Bawang Barat  | Panarangan Jaya | 1.201                        | 8                |
| <b>14</b>                                  | Kota Metro           | Metro           | 61,79                        | 5                |
| <b>TOTAL KECAMATAN DI PROVINSI LAMPUNG</b> |                      |                 |                              | <b>201</b>       |

Sumber : Badan Pusat Statistik, Lampung Dalam Angka (2012)